

519

INDUSTRI KECIL INDONESIA, MAMPUKAH BERPERAN?

Rin Purwani BUDI*

PENDAHULUAN

Pembangunan industri di Indonesia juga ditujukan untuk meningkatkan dan meratakan hasil pembangunan dengan penyebaran kegiatan usaha di semua daerah, peningkatan partisipasi golongan lemah dalam pemilikan dan penyelenggaraan usaha industri, perluasan lapangan kerja dan pemanfaatan potensi yang tersedia. Dalam Pelita III perhatian yang besar diberikan pada pengembangan industri kecil yang sifatnya padat karya demi terciptanya kesempatan kerja serta terciptanya suatu landasan pembangunan sektor industri yang lebih luas bagi pertumbuhan selanjutnya.

Jelas bahwa penentuan tujuan tersebut lebih mudah untuk dinyatakan daripada penemuan perangkat untuk mencapainya. Karena itu perlu untuk lebih dahulu membuat kerangka yang menggambarkan keadaan yang ada secara garis besarnya, dan mengerti hambatan-hambatan yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian dapat diketahui pendekatan yang sesuai untuk mengelola industri kecil di Indonesia.

Secara umum sasaran penting sektor industri dalam Repelita III dapat dinyatakan antara lain:

- (1) mencapai laju pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya;
- (2) memberikan sumbangannya dalam pemeratakan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, dalam hal ini khususnya harus cukup mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja;
- (3) mampu menghasilkan lebih banyak komoditi untuk ekspor, mengingat nilai ekspor komoditi minyak dan gas bumi harus menjadi lebih rendah dibandingkan dengan komoditi lain;

* Staf CSIS

- (4) mempersiapkan landasan agar industri permesinan (engineering industries) dapat memegang peranan penting dalam Repelita IV.

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan pengembangan industri secara terpadu, termasuk di dalamnya industri kecil. Melalui cara pembinaan yang tepat industri kecil dapat berkembang tanpa harus mengorbankan efisiensi. Untuk keperluan itu masih dibutuhkan banyak data sehingga diperoleh landasan yang kuat untuk mengadakan analisa guna menciptakan pendekatan yang paling sesuai bagi industri kecil di Indonesia. Tulisan ini merupakan suatu upaya menyajikan suatu gambaran keadaan dan pemikiran tentang industri kecil sebagai bagian yang cukup penting dalam pencapaian sasaran sektor industri secara keseluruhan.

PENGERTIAN INDUSTRI KECIL

Pembagian industri menurut skala perusahaan di Indonesia menghasilkan kelompok-kelompok industri: a) industri besar; b) industri sedang; c) industri kecil dan kerajinan rumah tangga.¹ Menurut Sensus Industri 1974/1975 oleh Biro Pusat Statistik, jumlah industri kecil yang ada di Indonesia adalah 1.234.511 buah. Namun menurut suatu sumber lain jumlah industri kecil itu diperkirakan kini mencapai 2,5 juta buah, termasuk dalam jumlah itu industri-industri kecil yang tidak mendaftarkan.

Yang dimaksud dengan "industri kecil" di Indonesia ialah industri dengan kriteria fisik sebagai berikut: investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan tidak lebih dari Rp. 70 juta, investasi per tenaga kerja tidak lebih dari Rp. 625.000,00; dan pemilik usaha adalah warga negara Indonesia. Di samping kriteria tersebut ada beberapa syarat lagi yang harus dipenuhi (bersifat nonfisik) agar suatu usaha dapat digolongkan ke dalam industri kecil, yaitu tentang macam produksinya, ciri kepemimpinan, sistem pembiayaan usaha dan permodalan, serta hubungan antara majikan dan buruh yang bercorak tertentu.² Klasifikasi ini penting, supaya industri kecil dapat dibedakan secara jelas dengan industri menengah dan besar. Industri kecil dapat dibedakan menjadi 4 golongan:

- 1 Lihat, M. Dawam Rahardjo, "Peta Bumi Industri Indonesia Tahun 1968-1981", *Eksekutif*, Maret 1981, hal. 58. Penulis ini mengelompokkan industri menjadi 4, dengan memisahkan industri kecil dan kerajinan rumah tangga.
- 2 Lihat, *Nota Keuangan dan RAPBN 1980/1981*, hal. 321. Dalam pembahasan ini digunakan kriteria menurut peraturan yang terakhir tersebut; bukan menurut kriteria Sensus Industri 1974/1975.

1. Golongan yang menghasilkan barang pemenuh kebutuhan pasar, yaitu industri kecil yang bekerja melalui proses teknis dan hasilnya dapat langsung dijual kepada konsumen, misalnya kompor, cangkul, perabot rumah tangga dan lain-lain.
2. Golongan yang menghasilkan barang pemenuh kebutuhan industri besar/menengah, yaitu industri kecil yang bekerja melalui proses teknis dan hasilnya dijual kepada industri lain, misalnya suku cadang dari kendaraan bermotor, trafo radio dan lain-lain.
3. Golongan yang menghasilkan barang-barang seni dan kerajinan yaitu industri kecil yang menghasilkan produk berdasarkan suatu kreasi seni/kerajinan tangan misalnya batik, perhiasan, ukir-ukiran, anyam-anyaman dan lain-lain.
4. Golongan yang berlokasi di desa-desa, yaitu industri kecil yang memenuhi kebutuhan wilayah akan jasa atau produk tertentu misalnya, reparasi sepeda motor, reparasi radio; tempe, tahu, kecap, kerupuk, bermacam-macam kue dan lain-lain.

Dengan makin disempurnakannya batasan mengenai industri kecil diharapkan usaha pengembangannya makin terarah.

Sebenarnya usaha pembinaan industri kecil telah ditempuh sejak berpuluh tahun yang lampau, yaitu sejak tahun 1950-an. Tampaknya usaha yang telah dilakukan belum memperlihatkan hasil seperti yang diharapkan. Berbagai hambatan menghalangi usaha berkembangnya industri kecil, termasuk mungkin belum mantapnya stabilitas politik dan ekonomi di masa lalu. Di samping itu terlalu kecilnya skala usaha industri kecil pada tahap pertama perkembangannya dulu, mengakibatkan berkurangnya segi efisiensi pembinaannya. Namun pada saat stabilitas politik dan ekonomi relatif telah terwujud, dapat diharapkan industri kecil mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembangunan nasional. Sebagai contoh, Negara India dan Jepang mampu menciptakan kondisi sedemikian rupa bagi industri kecilnya sehingga dapat memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi bangsa secara menyeluruh. Di India, lebih dari 30% ekonomi negaranya didukung oleh sektor industri kecil; di Jepang bahkan mencapai lebih dari 55%.

Di Indonesia tampaknya peluang besar ini belum dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga timbul kesan bahwa industri kecil kurang mendapatkan perhatian yang semestinya. Golongan masyarakat yang berusaha di bidang industri kecil sering mengeluh karena merasa kurang diperhatikan, bahkan seolah-olah dibiarkan dalam keadaan semakin rawan karena terhimpit oleh persaingan dengan industri besar atau menengah, atau barang-barang impor. Dibandingkan dengan di India dan Jepang misalnya, industri kecil di Indonesia jauh tertinggal dalam peranannya sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi

bangsa. Sektor industri secara keseluruhanpun ditinjau dari segi makro masih kecil sumbangannya terhadap produk nasional bruto Indonesia, yaitu sekitar 11%. Ini menandakan bahwa Indonesia sedang dalam tahap awal pengembangan industrinya. Walaupun demikian patut diakui bahwa telah terjadi kemajuan pesat di sektor industri selama dasawarsa terakhir. Sektor industri di mana industri kecil termasuk di dalamnya, memiliki potensi yang perlu segera direalisasikan dan dipercepat laju pertumbuhannya.

INDUSTRI KECIL DAN PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA

Seperti negara-negara berkembang pada umumnya, Indonesia memiliki penduduk yang padat karena laju pertumbuhannya yang tinggi. Terbatasnya lapangan kerja di satu pihak, sedangkan jumlah angkatan kerja terus bertambah di lain pihak menyebabkan timbulnya masalah penyerapan tenaga kerja. Informasi mengenai kelebihan angkatan kerja di Indonesia tampaknya tidak tersedia secara memadai. Namun secara umum dapat diterima bahwa proporsi tenaga kerja yang menganggur cukup tinggi. Perkiraan yang sering dipakai adalah 20% dari total. Di samping kenyataan bahwa jumlah tenaga kerja yang telah bekerja sesungguhnya belum dimanfaatkan sepenuhnya. Laju pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia relatif tinggi diperkirakan sekitar 2,5% bahkan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk, yang 2,1% per tahun.¹

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 1976 dapat diketahui bahwa di daerah pedesaan jumlah angkatan kerja yang bekerja rata-rata kurang dari 5 jam (untuk pekerjaan utamanya) per hari berjumlah 49%. Dengan perkataan lain hampir separuh dari seluruh angkatan kerja di pedesaan adalah setengah menganggur sampai menganggur sepenuhnya. Di daerah kota jumlah angkatan kerja yang setengah penganggur sampai menganggur sepenuhnya relatif lebih kecil, yaitu di bawah 30%.

Kenyataannya lebih dari setengah jumlah rakyat Indonesia berada di Pulau Jawa, sehingga pulau tersebut menjadi terlalu padat.² Struktur ekonomi Indonesia yang agraris seharusnya mampu menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduknya dalam bidang pertanian. Akan tetapi dalam kenyataannya sektor pertanian sudah tidak mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Maka sudah merupakan suatu kebutuhan untuk menyalurkan tenaga kerja yang berlebih agar mereka dapat mencari penghidupan di luar sektor pertanian. Salah satu kemungkinan untuk menciptakan

1 *Antara*, 22 Februari 1980

2 *Suara Karya*, 29 Desember 1979

usaha produktif guna menanggulangi masalah tersebut adalah melalui pengembangan industri kecil.

Ditinjau dari sudut kesempatan kerja, maka sekitar 83% dari seluruh tenaga kerja yang berada di sektor industri bekerja pada industri kecil termasuk di dalamnya kerajinan rumah tangga. Sedangkan industri sedang menyerap 6%, serta industri besar menyerap sekitar 11% sisanya. Sebagian besar tenaga kerja yang diserap oleh industri-industri kecil di Indonesia adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan khusus ataupun memiliki ketrampilan tertentu. Kenyataannya memang industri kecil pada umumnya tidak menuntut persyaratan pengetahuan teknis atau ketrampilan yang terlalu tinggi bagi tenaga kerjanya. Hal ini disebabkan industri kecil tersebut masih bekerja dengan alat-alat produksi yang sederhana serta modal yang masih terbatas.

Karena alasan-alasan tertentu pihak industri kecil juga berminat mengambil tenaga kerja yang mendapat pendidikan formal. Pertama-tama karena upah dan gaji yang harus dibayar untuk tenaga kerja ahli seringkali melampaui kemampuan finansial mereka. Di samping itu sebagian dari mereka sudah tahu bahwa pendidikan kejuruan di sekolah-sekolah ST dan STM kurang baik.¹ Anggapan semacam ini dapat timbul oleh sebab banyaknya lulusan sekolah semacam itu yang ternyata tidak memiliki bekal yang cukup untuk terjun dalam pekerjaan. Pengetahuan yang mereka miliki dari hasil belajar di sekolah tidak membuat mereka bertambah kreatif dan memiliki inisiatif dalam bidangnya. Dan akhirnya banyak industri-industri kecil yang sama sekali kurang merasakan pentingnya pendidikan kejuruan dalam bidang pekerjaan. Karena tidak mengetahui adanya kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam perusahaan serta penawaran tenaga kerja terdidik, mereka tetap berada dalam struktur tradisional sebagaimana adanya.²

Cara memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri kecil biasanya dilakukan dengan menarik anggota keluarga pemilik usaha yang bersangkutan. Seringkali dijumpai dalam suatu industri kecil seluruh anggota keluarga adalah tenaga kerja yang tidak diupah. Ini merupakan hasil usaha bersama keluarga dan hasilnya pun dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Biasanya dalam industri-industri rumah tangga berlaku pola kerja semacam ini. Bagi industri kecil yang lain yang membutuhkan lebih banyak pekerja,

1 Christian Lempelius & Gert Thoma, "Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat, Pendekatan Kebutuhan Pokok", LP3ES, 1979, hal. 57; pendapat ini disesuaikan dengan pendapat penulis sendiri dengan pertimbangan bahwa sebenarnya industri kecil tidak menolak secara mutlak pemakaian tenaga yang memiliki pendidikan formal. Hanya berdasarkan pertimbangan upah yang tinggi mereka tidak mau memakai tenaga kerja berpendidikan formal.

2 *Ibid.*, hal. 57

akan mencari tenaga yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Dalam hal ini sistem kekerabatan amat dipentingkan, namun tidak tertutup kemungkinan bagi orang luar, sejauh tenaga mereka dibutuhkan. Jumlah industri kecil yang semakin bertambah dewasa ini membuka kemungkinan kesempatan kerja baru bagi tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan ataupun ketrampilan khusus. Dengan demikian berarti tenaga kerja yang ada dilibatkan dalam usaha produktif industri kecil yang bersifat padat karya itu.

Sehubungan dengan jumlah tenaga kerja yang amat berlimpah dibandingkan dengan jumlah kebutuhannya, maka tak dapat dihindari berlakunya Hukum Harga. Jumlah permintaan tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan jumlah penawaran yang ada menyebabkan upah cenderung menurun. Walaupun pemerintah telah menetapkan jumlah upah minimum bagi pekerja, akan tetapi dalam kenyataannya banyak pengusaha yang membayar upah lebih kecil dari jumlah minimum yang telah ditetapkan. Keadaan semacam ini biasanya diterima oleh para pekerja mengingat sulitnya mendapat pekerjaan lain. Kadang-kadang keadaan inipun di luar kekuasaan pemilik industri kecil. Cara kerja yang kurang efisien pada sebagian besar industri kecil menyebabkan struktur biaya produksi cenderung tinggi. Untuk menekan harga maka mereka menekan upah serendah mungkin. Keadaan semacam ini membutuhkan penanganan secara cermat agar pengembangan industri kecil dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

PEMBINAAN INDUSTRI KECIL

Usaha-usaha untuk mengembangkan industri kecil telah dilakukan sejak tahun 1950. Dari suatu periode ke periode berikutnya kebijakan yang ditetapkan ternyata berubah-ubah bergantung pada keadaan perekonomian pada masa itu. Perkembangan model kebijaksanaan dan program pengembangan industri kecil sejak tahun 1950-1981 secara terperinci dapat dibaca pada Lampiran.

Pada tahun 1950 sampai tahun 1960 pelayanan teknologi industri kecil mendapatkan perhatian utama di samping pembentukan perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan daerah di bidang kerajinan. Pada tahun 1960-1965 relatif tidak begitu banyak usaha pembinaan yang telah dilakukan mengingat keadaan ekonomi dan politik pada masa tersebut kurang memungkinkan. Di antara yang dilakukan adalah pembentukan yayasan dana industri kecil. Pada tahun 1969 sampai tahun 1973 bersamaan dengan masa Repelita I dibentuk Program Pembinaan Kerajinan Rakyat dengan berbagai proyek-proyeknya. Selanjutnya pada tahun 1973-1978 telah dimantapkan usaha pem-

binaan industri kecil dengan pembentukan proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (Bipik). Usaha ini juga ditunjang dengan penyediaan dana untuk permodalan berupa fasilitas kredit dari pemerintah. Di samping itu, mulai diselenggarakan promosi ekspor. Pada masa itu pula didirikan koperasi-koperasi primer kerajinan rakyat dan industri kecil di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Koperasi. Kebijaksanaan ini diteruskan dan semakin disempurnakan pada tahun-tahun sesudahnya. Kemudian pada tahun 1978 hingga saat ini ada beberapa usaha pembinaan penting yang perlu dicatat yaitu, dibentuknya Direktorat Jenderal khusus yang menangani industri kecil dan kerajinan rakyat; didirikannya kawasan industri mini khusus untuk industri kecil; dikembangkannya sistem "Bapak Angkat" dalam rangka kerja sama industri kecil dengan industri besar; dan lain-lain.

Di satu pihak, telah banyak usaha pembinaan yang dilakukan bagi industri kecil dengan berbagai program yang telah ditetapkan. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 1981/1982 juga dinyatakan bahwa kebijaksanaan itu dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan usaha ke arah tercapainya keadilan sosial yang lebih baik sehingga dunia usaha golongan ekonomi lemah meningkat. Di pihak lain, timbul pertanyaan seberapa jauh usaha pembinaan industri kecil ini telah dapat dipetik hasilnya melalui jumlah produksi dan peranan dalam perekonomian yang semakin meningkat?

Tabel 1

PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH INDUSTRI KECIL DI DAERAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA PADA TAHUN 1975

	Produksi		Nilai tambah	
	milyar Rp	%	milyar Rp	%
Jawa Tengah				
Total	310	100	121,8	100
Industri kecil	84,0	27	31,5	26
D.I. Yogyakarta				
Total	36,1	100	11,9	100
Industri kecil	13,1	36	4,0	32

Sumber: Diolah dari data dalam buku *Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Pendekatan Kebudayaan Pokok*, LP3ES, 1979, hal. 39¹

¹ *Op. cit.*, hal. 39. Oleh penulis ini diakui bahwa data tersebut sangat sulit diperoleh di Indonesia karena sedikit sekali perusahaan kecil yang melakukan pembukuan. Angka-angka yang tercantum harus diakui agak kabur sifatnya, namun diperlukan untuk membuat analisa kecenderungan keadaannya.

Untuk membahas volume produksi, produktivitas dan intensitas kerja industri kecil, berikut ini disajikan suatu hasil studi di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dalam Tabel 1 merupakan nilai produksi dan nilai yang ditambahkan (value added) industri kecil di daerah tersebut pada tahun 1975. Termasuk dalam pengertian industri kecil tersebut, industri kerajinan.¹

Industri kecil di daerah Jawa Tengah dengan produksi Rp 84,0 milyar merupakan sekitar 27% dari seluruh nilai produksinya. Sedangkan di daerah Yogyakarta, Rp 13,1 milyar yang merupakan 36% dari seluruh nilai produksinya. Nilai tambah yang dihasilkan oleh industri kecil tersebut masing-masing 26% dan 32% untuk daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Seluruh sektor perindustrian hanya mengambil bagian sebesar 13% saja pada produk total bruto daerah Jawa Tengah. Berdasarkan angka persentase ini jelaslah betapa kecilnya peranan industri kecil dalam kehidupan ekonomi Jawa Tengah.² Bagianya pada produk total bruto Jawa Tengah adalah kurang dari 4%.

Data tentang produksi dan nilai tambah di atas dapat dikaitkan dengan data pekerja untuk menunjukkan produktivitas kerja industri kecil dibandingkan dengan industri besar dan sedang. Berikut ini dalam Tabel 2 disajikan data output rata-rata dan nilai tambah rata-rata setiap pekerja dalam setahun.

Tabel 2

RATA-RATA HASIL DAN NILAI TAMBAH YANG DICAPAI SETIAP PEKERJA DI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA PER TAHUN

Industri	Output per pekerja		Nilai Tambah per pekerja			
	Jateng	D I Y	Jateng	%	D I Y	%
	(Rp 1.000,00)	(Rp 1.000,00)	(Rp 1.000,00)		(Rp 1.000,00)	
Industri kecil	415	405	135	13,7	123	13,3
Industri sedang	620	530	250	25,4	170	18,4
Industri besar	1.500	1.810	600	60,9	630	68,3
Total			985	100,0	923	100,0

Sumber: Diolah dari data dalam buku *Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Pendekatan Kebudayaan Pokok*, LP3ES, 1979, hal. 40. (Angka-angka dibulatkan)

1 Data industri kecil dan kerajinan dalam data aslinya dipisahkan, tetapi dalam hal ini digabungkan untuk menyederhanakan masalahnya.

2 *Op. cit.*, hal. 39 dan 40

Dibandingkan dengan industri besar dan sedang, produktivitas kerja industri kecil sangat rendah. Mungkin sebab-sebabnya antara lain karena perusahaan-perusahaan kecil pembebanan kapasitasnya rendah (termasuk kerja musiman), metode-metode dan alat-alat produksinya usang.¹ Sebagian tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil adalah tenaga kerja musiman atau sambilan. Pada saat-saat tertentu, misalnya masa sesudah panen bagi para petani, merupakan waktu luang yang dipergunakan untuk bekerja pada industri-industri kecil setempat. Menurut data di atas, industri kecil hanya mampu menyumbang 13,7% nilai tambah untuk seluruh sektor industri di Jawa Tengah dan 13,3% di daerah Yogyakarta. Kenyataan ini menunjukkan bahwa produktivitas industri kecil di Indonesia pada umumnya masih rendah. Ditinjau dari keadaan tersebut tampaknya industri kecil belum mampu bersaing dengan industri besar maupun industri sedang.

MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI INDUSTRI KECIL

Masalah pokok pengembangan industri pada umumnya adalah bagaimana menata sektor industri dan mengarahkannya sehingga dapat menjadi landasan kuat tercapainya pola dan struktur yang dikehendaki, yaitu yang memungkinkan pertumbuhan sektor industri secara luas.

Pengembangan industri kecil juga diarahkan untuk menunjang tercapainya sasaran sektor industri pada umumnya. Dalam pengembangannya dijumpai banyak hambatan yang timbul karena berbagai keterbatasan industri kecil itu sendiri, dan juga karena belum terciptanya keadaan yang menguntungkan bagi perkembangannya. Pola dan struktur industri yang ada saat ini belum sepenuhnya memberikan iklim yang merangsang atau menunjang pertumbuhan industri kecil. Cabang-cabang industri masing-masing berkembang dan seringkali tanpa kaitan satu sama lain. Bahkan tidak jarang terjadi persaingan antara industri yang satu dan industri yang lain dengan akibat matinya industri yang lebih lemah. Kaitan antara kelompok-kelompok industri masih lemah, baik kaitan ke depan maupun kaitan ke belakang. Demikian pula pertumbuhan industri kecil, sedang dan besar belum berjalan seimbang. Sudah barang tentu jenis industri yang memiliki kekuatan modal, dan memiliki keuntungan skala besar sehingga lebih efisien dalam proses produksinya (keuntungan "economies of scale"), akan menang. Biasanya industri besar dan menengah memiliki kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga industri kecil selalu di pihak yang kalah. Hingga saat ini perkembangan industri besar belum dimanfaatkan untuk menarik perkembangan industri kecil secara luas. Memang telah ada sebagian kecil industri besar dan sedang yang mulai

1 *Op. cit.*, hal. 40

mengaitkan usahanya dengan usaha industri kecil, akan tetapi belum ada suatu sistem yang berlaku umum yang menjamin saling keterkaitan di antara mereka.

Masalah-masalah lain yang sering dijumpai oleh industri-industri kecil adalah masalah perencanaan yang matang yang meliputi segi-segi permodalan, penyediaan bahan baku, teknik produksi dan pemasaran. Kurang diperhatikannya segi perencanaan ini oleh industri-industri kecil menimbulkan kemungkinan macetnya industri kecil itu di tengah jalan karena persoalan kekurangan modal ataupun masalah kekurangan penyediaan bahan baku. Masalah modal dan bahan baku seringkali merupakan dua masalah yang sangat erat hubungannya.

Masalah kekurangan modal tersebut telah dicoba untuk diatasi dengan bantuan kredit khusus yaitu KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), walaupun usaha ini belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan. Sebenarnya usaha pemberian kredit ini besar manfaatnya bagi kemajuan usaha golongan ekonomi lemah, tetapi rupanya bantuan ini belum dapat dinikmati oleh sebagian besar dari mereka.¹ Seperti dikatakan oleh Dr. Mubyarto, ada gejala bahwa bank-bank pelaksana memang kurang menunjukkan minat yang besar untuk menyalurkan KIK dan KMKP, sehingga plafond kredit yang tersedia tidak dapat didekati apalagi dihabiskan. Kalau di satu pihak industri-industri kecil mengeluh karena kebutuhan kredit mereka tidak terpenuhi, di pihak lain perbankan mengeluh karena kekurangan obyek yang dapat dibantu, maka tentunya ada masalah yang menyebabkan adanya gap tersebut.²

Berbagai sebab dikemukakan untuk menerangkan hal ini, antara lain adalah rendahnya tingkat pendapatan bank, resiko yang tinggi dari kredit dan ketidakmampuan pengusaha kecil untuk menyediakan agunan yang cukup bagi kreditnya. Terhadap keterangan-keterangan yang demikian diajukan keterangan lain, bahwa sebenarnya masalahnya bukanlah semata-mata pada keengganan bank-bank pelaksana. Apabila hal ini benar, maka diduga sebabnya terletak pada hubungannya dengan sistem hadiah (reward system) yang tidak tertulis tetapi merupakan praktek biasa. Makin besar kredit yang diberikan, makin lumrah pemberian hadiah kepada pejabat bank yang dianggap berjasa. Ini berarti bahwa penyaluran KIK dan KMKP tidak menarik bagi (pejabat) bank pelaksana karena tiadanya kemungkinan hadiah.³ Penurunan

1 Nancy Suhut, "Masalah KIK dan KMKP", *Analisa*, Agustus 1980, hal. 752

2 Mubyarto et.al., "Pengembangan Industri Pedesaan di Jawa Tengah", *Agro Ekonomika*, Oktober 1979, hal. 85

3 *Ibid.*, hal. 85

jumlah pinjaman secara terus-menerus itu dapat mengakibatkan macetnya peredaran kedua macam kredit tersebut. Kiranya masalah ini masih membutuhkan penanganan baik dari segi prosedur untuk memperoleh kredit maupun segi pelaksanaan secara teknis pemberian kredit, sehingga lebih banyak industri kecil dapat merasakan manfaat bantuan ini.

Di samping bantuan KIK dan KMKP di atas, pemerintah telah merealisasikan bantuan kredit berjumlah relatif kecil yang dinamakan "Kredit Mini" untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha kecil. Untuk sektor industri kecil pelaksanaan penyaluran kredit ini akan dipermudah dan diusahakan sepraktis mungkin, yaitu tanpa jaminan, cukup dengan rekomendasi pejabat yang bertanggung jawab. Mekanisme Kredit Mini ini mirip dengan kredit Bimas di lingkungan Departemen Pertanian. Cara ini ditempuh untuk mengatasi kesulitan industri kecil dalam masalah permodalan. Namun tidak dapat dihindarkan bahwa masih banyak industri kecil yang belum memanfaatkan bantuan ini berhubung kurangnya pengetahuan mereka dalam soal perkreditan tersebut.

Sebenarnya beberapa cabang industri kecil mempunyai potensi perkembangan yang dinamis. Tampaknya kesan yang melekat pada industri kecil pada umumnya adalah sifatnya yang statis atau prospek pertumbuhan yang lamban. Hal ini sedikit banyak berkaitan dengan masalah pemasaran hasil produksi mereka. Apabila luas pasar industri kecil telah meluas ke tingkat nasional dan internasional, niscaya beberapa cabang industri kecil dapat mengembangkan usahanya semaksimal mungkin. Terutama usaha-usaha industri kecil yang dapat secara langsung dikaitkan dengan usaha industri besar dan menengah memiliki prospek pertumbuhan yang cerah karena pasaran produknya terjamin.

Bagaimanapun hasil produksi industri kecil menuntut untuk segera dipasarkan. Hal ini mengingat faktor modal yang terbatas yang tidak memungkinkan bagi industri kecil menimbun persediaan/stock hasil industrinya, sebelum dilempar ke pasar dengan harga yang memadai. Masalah pemasaran ini sekaligus menyangkut masalah mutu dan harga barang.

Menurut C. Prior seorang ahli dari German Agency for Technical Cooperation (GTC) masalah mutu ternyata tidak semudah yang dibayangkan orang. Lebih-lebih lagi jika barang-barang dimaksudkan untuk ekspor ke negara-negara maju. Lebih lanjut dijelaskan sifat dasar "mutu" yang menyangkut kualitas disain, kualitas penyesuaian, masalah penyediaan barang, pelayanan langganan, hubungan harga dengan kualitas yang diinginkan.¹ In-

¹ Lihat, *Antara*, 22 Februari 1980

dustri kecil di Indonesia sebagian besar masih belum memperhatikan faktor-faktor mutu tersebut, sehingga ruang lingkup pemasarannya pun sempit, yaitu bersifat lokal. Apabila pemasaran hasil industri kecil dapat menjangkau ruang lingkup nasional maupun internasional, dapat diharapkan perkembangannya akan lebih pesat. Pembentukan "Trading House" di pusat-pusat perniagaan yang dianggap penting berfungsi untuk menghimpun penjualan hasil-hasil industri kecil sehingga lebih memudahkan industri kecil menemukan konsumennya. Penjualan hasil industri kecil secara bersama ini menimbulkan konsekuensi perlunya standardisasi. Dewasa ini telah ada kepercayaan terhadap sebagian hasil industri kecil. Dengan ditetapkannya standar yang dapat dijangkau kemampuan industri kecil baik secara teknis maupun ekonomis maka diharapkan lebih banyak transaksi akan dilakukan dengan industri kecil secara menguntungkan.

Ditinjau dari segi kebijaksanaan harga, industri kecil pada umumnya di satu pihak menentukan harga yang relatif tinggi untuk barang hasil produksinya. Kelemahan ini timbul karena biaya produksi yang tinggi akibat panjangnya jalur bahan baku sampai ke tangan pengusaha industri kecil serta terbatasnya modal. Di lain pihak sebagian pengusaha industri kecil belum mengenal perhitungan biaya pokok untuk hasil produksinya. Kadang-kadang biaya tenaga kerja tidak dimasukkan ke dalam komponen biaya produksi sebab proses produksi dijalankan oleh anggota keluarga yang tidak dibayar. Dalam perkembangannya lebih lanjut, cara sedemikian ini tidak dapat dipertahankan dan hanya merugikan perkembangan industri kecil.

Kesimpulan sementara yang dapat dinyatakan sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh industri kecil adalah persoalan dasar pemasaran yang berpangkal pada kelemahan produknya sendiri. Kelemahan hasil produksi industri kecil ini menyangkut mutu barang yang amat bergantung pada kemampuan/ketrampilan teknis dan disain yang dihasilkan oleh industri kecil. Untuk melihat sejauh mana ketrampilan teknisnya maka perlu tinjauan tenaga kerja yang berada dalam industri kecil.

Sebagian besar tenaga kerja dalam industri kecil terdiri dari lulusan sekolah dasar atau bahkan belum tamat sekolah dasar. Biasanya mereka memperoleh keahliannya berdasarkan pengalaman kerja (sistem magang). Untuk jenis industri tertentu yang kebanyakan bersifat kerajinan, ketrampilan diperoleh secara turun temurun sehingga corak dan disain barang yang dihasilkan selalu sama. Alat-alat produksi kebanyakan masih bersifat tradisional sehingga produktivitasnya pun terbatas. Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan keengganan industri kecil untuk mencari tenaga yang memiliki pendidikan formal karena keterbatasannya sendiri. Dari segi pemilik yang sekaligus sebagai pengelola usaha industri kecil, biasanya memiliki kemam-

puan teknis kepemimpinan yang terbatas. Dapat dijumpai dewasa ini pengusaha industri kecil yang belum mengenal pencatatan kegiatan dalam organisasi usahanya secara sistematis. Oleh sebab itu dapat dimengerti mengapa industri kecil kurang menunjukkan perkembangan yang berarti, baik ditinjau dari segi mutu maupun segi volume dan variasi produksinya.

Untuk mengatasi hambatan itu, sejak tahun 1974 telah dibentuk Bipik (Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil) beserta sub-proyeknya di setiap propinsi. Badan ini bertugas memberikan bimbingan berupa pendidikan dan latihan-latihan yang bermanfaat bagi peningkatan ketrampilan pekerja, pembaharuan disain, dan secara umum membimbing ke arah peningkatan mutu dan perkembangan industri kecil. Sejauh ini masih dijumpai Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) yang bertugas memberikan bimbingan kepada para pekerja, namun kurang memiliki ketrampilan tentang jenis industri yang harus dibimbingnya. Hal semacam ini jelas membutuhkan penanganan dan penyempurnaan segera agar Bipik dapat menjalankan fungsi yang sebenarnya.

MINI INDUSTRIAL ESTATE

Bantuan yang diberikan kepada industri kecil sebaiknya tidak menimbulkan ketergantungan yang terus-menerus, tetapi justru mendorong agar industri kecil mampu berdiri sendiri. Untuk tercapainya keadaan tersebut dibutuhkan suatu kebijaksanaan yang terpadu, tegas dan konsisten.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan, diantaranya pada tahun 1980 direalisasikan pendirian Mini Industrial Estate. Kawasan industri kecil ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari peralatan sampai pada tempat industri kecil membuka usahanya. Selain disediakan mesin-mesin yang dibutuhkan juga diusahakan penyediaan bahan baku yang diperlukan serta penyelenggaraan kursus-kursus untuk peningkatan ketrampilan dan pembaharuan disain. Dengan adanya Mini Industrial Estate ini dapat dimanfaatkan "economies of scale" melalui cara penyediaan sarana bersama. Industri kecil yang dulunya terpencar-pencar sehingga menyulitkan pembinaannya, sekarang dapat disatukan di Mini Industrial Estate. Dengan demikian usaha pembinaannya dapat terpadu dan lebih intensif.

Setiap Mini Industrial Estate disesuaikan dengan keadaan daerah lokasinya masing-masing, dengan luas sekitar 5 sampai 10 hektar dan bersifat lokal. Pada tahap pertama kawasan industri mini ini dibangun di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Tegal, Semarang, Yogyakarta, Cilacap, Sidoarjo

Pada umumnya daerah-daerah tersebut telah ada industri-industri kecil yang mulai tumbuh dengan baik. Dengan adanya fasilitas yang dapat digunakan bersama, cabang industri kecil yang mempunyai potensi dinamis dapat memanfaatkan "economies of scale". Dalam beberapa hal perlu penyediaan sarana bersama untuk mencapai efisiensi yang diharapkan. Sebab akan terlalu mahal dan tidak efisien apabila sarana semacam itu disediakan oleh masing-masing industri kecil secara sendiri-sendiri. Pada garis besarnya sarana tersebut dapat dibagi dalam dua kategori yaitu pelayanan bersama dan fasilitas produksi bersama. Termasuk dalam kategori pelayanan bersama antara lain: pengadaan bahan baku; penerapan standardisasi; pengawasan mutu; penyediaan fasilitas pendidikan dan latihan; penyediaan fasilitas pemasaran; dan fasilitas bank. Termasuk dalam kategori fasilitas produksi bersama antara lain penyediaan alat-alat produksi atau mesin-mesin tertentu; laboratorium.

Sampai akhir Repelita IV di Indonesia diharapkan sudah terdapat tidak kurang 200 kawasan industri mini. Dengan demikian cabang industri kecil yang memiliki dinamika dan strategis dalam pembangunan dapat ditunjang perkembangannya. Selanjutnya industri kecil ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya, dan berkembang dengan pesat sesuai dengan sifatnya, misalnya industri kecil yang mengolah hasil-hasil pertanian; industri kecil yang membuat komponen, suku cadang dalam kaitannya dengan industri besar dan sedang.

PENUTUP

Industri kecil di Indonesia merupakan salah satu cara untuk menanggulangi masalah penyerapan tenaga kerja baik saat ini maupun di masa depan. Laju pertumbuhan tenaga kerja yang cepat di samping daya serap tenaga kerja di sektor pertanian yang rendah, menuntut dikembangkannya sektor lain di luar pertanian, terutama sektor industri yang memiliki elastisitas kesempatan kerja yang tinggi terhadap tiap unit modal.

Melalui pengembangan industri kecil di Indonesia diharapkan dapat dicapai sasaran peningkatan dan perataan hasil pembangunan dengan penyebaran kegiatan di semua daerah. Peningkatan partisipasi golongan lemah dalam pemilikan dan penyelenggaraan industri lebih dimungkinkan. Saat ini belum besar peranan industri kecil Indonesia dalam kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Akan tetapi dalam jangka panjang melalui serangkaian pembinaan yang intensif dan terpadu, industri kecil memiliki potensi untuk memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa.

Berbagai kelemahan masih dijumpai dalam kegiatan industri kecil dewasa ini sehingga memperlambat perkembangannya. Kelemahan utama industri kecil pada umumnya adalah kekurangan modal, bahan baku, ketrampilan, manajemen dan terkait dengan masalah kurang matangnya perencanaan. Keadaan ini semakin dipersulit karena belum tersedianya suatu sistem tata niaga bahan baku dan bahan jadi yang menguntungkan bagi para pengusaha industri kecil. Berbagai macam usaha dan kebijaksanaan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kesulitan ini. Antara lain dengan mengeluarkan daftar barang-barang yang hanya boleh diproduksi oleh industri kecil dalam upaya melindunginya dari persaingan dengan industri besar dan sedang. Di samping itu telah dibangun kawasan industri mini untuk mengatasi hambatan-hambatan yang melekat pada industri kecil pada umumnya. Pada gilirannya industri kecil diharapkan mampu memberikan sumbangannya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lampiran

PERKEMBANGAN MODEL KEBIJAKSANAAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL 1950—1981

- 1950 - 1960: 1. Pelayanan teknologi:
- Proyek-proyek percontohan: sabut kelapa, bata genteng, keramik dan sebagainya;
 - Pendirian induk-induk kerajinan rakyat: kulit, pandai besi, bambu dan sebagainya;
 - Latihan-latihan kepada pengrajin.
2. Pembentukan perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan daerah di bidang kerajinan.

- 1960 - 1965: 1. Pendirian badan-badan pembina tingkat propinsi untuk mengkoordinasikan dan mengembangkan industri kecil.
2. Pembentukan yayasan dana industri kecil.

- 1969 - 1973: 1. Pembentukan Program Pembina Kerajinan Rakyat dengan proyek-proyek: (Repelita I)
- Proyek induk perusahaan
 - Proyek pemanfaatan limbah
 - Proyek pusat penyaluran bahan baku
 - Proyek bantuan mekanisasi dan tenaga ahli
 - Proyek pusat pemasaran barang-barang kerajinan

- 1973 - 1978: 1. Pembentukan proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (Bipik):
- Penelitian soal ekonomi untuk perencanaan dan identifikasi profil industri kecil, riset komoditi.
 - Pendirian Pusat Pengembangan Industri Kecil (PPIK) di beberapa kota seperti Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Denpasar yang melakukan asistensi pemasaran dan produksi barang-barang kerajinan dan industri kulit.

- c. Pendirian Pusat Pelayanan Teknis di berbagai sentra produksi suatu jenis industri tertentu: rotan, minyak atsiri, garam dan sebagainya.
 - d. Melakukan pengembangan terpadu terhadap sentra-sentra produksi melalui Tenaga Pembina Lapangan.
 - e. Menyelenggarakan kursus-kursus manajemen AMT, dan latihan-latihan ke-trampilan.
 - f. Memberikan bantuan-bantuan mesin dan melakukan demonstrasi plot.
 - g. Menyelenggarakan pameran-pameran dalam rangka promosi pemasaran.
2. Penyediaan fasilitas kredit kecil melalui program-program KIK/KMKP oleh Bank Indonesia, dengan Bank Pemerintah sebagai pelaksana dan ditunjang dengan memberikan jaminan kredit oleh PT Askrindo.
 3. Menyelenggarakan promosi ekspor melalui program Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), bagian Ekspor Hasil-hasil Kerajinan.
 4. Mendirikan koperasi-koperasi primer kerajinan rakyat dan industri kecil yang dibimbing oleh Direktorat Jenderal Koperasi.

- 1978 - 1981:
1. Membentuk Direktorat Jenderal khusus yang menangani industri kecil dan kerajinan rakyat.
 2. Mendirikan kawasan industri mini untuk industri kecil dan kerajinan di beberapa tempat.
 3. Mengembangkan sistem "Bapak Angkat" dalam rangka kerja sama industri kecil dengan industri-industri besar.
 4. Memberi kemudahan pada pengusaha industri kecil untuk mendapatkan proyek dari pemerintah melalui pelaksanaan Keppres 14-A.
 5. Pengintegrasian koperasi kerajinan pada tingkat desa kepada KUD setempat.
 6. Membentuk "Trading House" yang akan memasarkan barang-barang hasil industri kecil.

Sumber: M. Dawam Rahardjo, "Peta Bumi Industri Indonesia Tahun 1969-1981", *Eksekutif*, Maret 1981, hal. 62-63